

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Nurmin¹,

Email : nurmin@gmail.com

Mahasiswa Prodi Akuntansi STIEM Bongaya Makassar, Indonesia

Siti Masyita²,

Email :

Dosen Prodi Manajemen STIEM Bongaya Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama author : Nurmin/ 081345661442

E-mail : nurmin@gmail.com

Received : 30 Januari 2023, Revised: 5 Februari 2022, Accepted: 25 Februari 2023

Published : 26 Maret 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang dan menggunakan analisis uji regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan dan parsial Kejelasan pengaruh Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang.yang berarti semakin baik kejelasan sasaran anggarannya, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga meningkat, nilai r square memiliki besaran sedang dikarenakan masih ada responden yang menjawab netral pada semua pertanyaan yang diajukan.

Kata kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja

Abstract: *This study aims to determine and analyze the clarity of budget targets, accounting control and reporting systems on the accountability of the performance of local government agencies of Enrekang Regency. The sample in this study was as many as 50 people and used multiple linear regression test analysis. The results showed that both simultaneously and partially the clarity of the influence of Budget Targets, Accounting Control and Reporting Systems on the Accountability of Performance of Local Government Agencies of Enrekang Regency.which means the better the clarity of budget targets, Accounting Control and Reporting Systems, the Accountability of Government Agency Performance also increases, the r square value has a moderate magnitude because there are still respondents who answer neutral to all questions asked.*

Keywords: *Clarity of Budget Objectives, Accounting Control, Reporting System, Performance Accountability*

I. PENDAHULUAN

Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya dengan baik. Untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, anggaran merupakan dokumen kontrak politik antara pemerintah dan DPRD sebagai wakil rakyat, untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009-61). Selanjutnya, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah sebagai agen dan masyarakat (yang diwakili oleh lembaga perwakilan atau DPRD) sebagai propinsial.

Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari agen atau pemerintah daerah, serta merupakan proses akuntabilitas public (bastian; 2010-189). Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Selain itu, anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi Nordiawan (2006). Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah, menjadi relevan dan penting. pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas dan value for money yang merupakan inti pengukuran kinerja unit-unit kerja pemerintah. *Value for money* berarti di terapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekomoni, efisiensi, dan efektivitas. Value for money dapat terwujud jika didukung adanya komitmen semua individu dalam organisasi atau yang sering disebut komitmen organisasi.

Komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternative terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Menurut Mardiasmo (2009-65) peningkatan perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas dengan cara perbaikan sistem akuntansi sector publik diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi efisiensi serta efektivitas pemerintah daerah, terutama dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggung jawaban yang menggunakan sistem pengendalian akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintah daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) DAN satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPKD harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin.

Fenomena saat ini pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal namun saat ini sistem informasi akuntansi yang dimiliki beberapa pemerintah daerah masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan sistem tersebut dapat menyedihkan bagi yang berkepentingan terutama dalam hal pengambilan keputusan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusumaningrum (2010) meneliti tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengenalan akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala sub bagian/kepala sub seksi pada lembaga teknis daerah provinsi Jawa Tengah sebanyak 108 orang. Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

II. LITERATUR REVIEW

1. Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedang penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan anggaran (Mardiasmo, 2009). Karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggarannya. Selanjutnya, target anggaran yang disusun akan sesuai dengan anggaran yang ingin dicapai organisasi. Adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja.

Menurut Locked & Latham dalam Samuel (2012), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan: (a) Tujuan, (b). Kinerja, (b) Standar, (e) Jangka waktu, (f) Sasaran prioritas, (g) Tingkat kesulitan, (h) Koordinasi

2. Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi mencakup semua aset dari transaksi keuangan misalnya pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana dan pengamanan dan dari penggunaan tidak sah. Chusing and romeey dalam Abdullah (2011) menyatakan bahwa pilihan struktur organisasi memiliki implikasi yang signifikan dengan sistem informasi akuntansi, semakin tinggi derajat disentralisasi maka semakin besar kebutuhan institusi induk terhadap pengendalian akuntansi untuk mengontrol, mengevaluasi aktivitas dan tanggung jawab yang didelegasikan, dengan demikian maka desentralisasi mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan pengendalian akuntansi. Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi, suatu perusahaan harus mempunyai enam prinsip dasar (Bambang Hartadi, 2006) yaitu: (a) Pemisahan fungsi, (b) Prosedur pemberian wewenang, (c) Prosedur dokumentasi, (d) Prosedur dan pencatatan akuntansi.

3. Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pempinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar mampu memantau atau mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah, 2011)

3. Akuntabilitas Kinerja

Peraturan menteri PAN dan RB no 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam organisasi sector public akuntabilitas memiliki beberapa aspek atau dimensi. Mardiasmo (2009:21-23) menjelaskan bahwa terdapat empat indikator akuntabilitas pada instansi pemerintah yaitu: (a) akuntabilitas hukum dan kejujuran, (b) Akuntabilitas proses, (c) Akuntabilitas program, (d) Akuntabilitas kebijakan

Hipotesis

- H1 : Terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
- H2 : Terdapat pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H3 : Terdapat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

III. METODOLOGI

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah tipe pendekatan kuantitatif yaitu menganalisis data dalam bentuk angka-angka kemudian membahasnya melalui perhitungan dari skor atau nilai rata-rata dari setiap variabel, kemudian dilanjutkan dengan analisis statistik yang dilakukan untuk membuktikan pengaruh antara variabel- variabel yang diamati (Sugiyono, 2016). Penelitian dilakukan diseluruh SKPD yang ada di kabupaten Enrekang yang berjumlah 18 SKPD. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 responden, metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling karena responden yang dipilih hanya berkaitan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Metode pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan antara satu variabel terhadap variabel lain. Model persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Keterangan :

Y : akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

X1 : kejelasan sasaran anggaran

X2 : pengendalian akuntansi

X3 : sistem pelaporan

a : konstanta

bx : koefisien regresi

e : eror

Hasil

Hasil pengujian mencakup hasil uji validitas dan reliabilitas, hasil uji asumsi klasik dan hasil uji hipotesis. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua indikator dari masing masing variable adalah valid dan reliabel. Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model telah memenuhi asumsi normalitas, semua variabel tidak memiliki masalah multikolonieritas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model.

Tabel 1 : Uji Hipotesis

Uraian	Koefisien Regresi	t- hitung	p-value (sig)
Constant	14,807	2,756	0,001
Kejelasan sasaran anggaran	0,598	1,969	0,002
Pengendalian akuntansi	0,618	3,345	0,002
Sistem pelaporan	1,265	4,232	0,000
Dependen Variabel AKIP			

Sumber : Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel uji parsial tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hasil uji hipotesis parsial nilai t_{hitung} variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) sebesar 1,969 yang lebih besar dari t_{tabel} yakni sebesar 1,687 atau $t_{hitung} 1,969 > 1,687 t_{tabel}$. Maka hipotesis pertama (H_1) diterima. Sementara untuk nilai koefisien regresi ini dapat dinyatakan signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,002 ($0,002 < 0,05$) Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Uji hipotesis parsial nilai t_{hitung} variabel pengendalian akuntansi (X_2) sebesar 3,345 yang lebih besar dari t_{tabel} yakni sebesar 1,687 atau $t_{hitung} 3,345 > 1,687 t_{tabel}$. Maka hipotesis pertama (H_3) diterima. Sementara untuk nilai koefisien regresi ini dapat dinyatakan signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,002 ($0,002 < 0,05$) Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi pengendalian akuntansi (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Uji hipotesis parsial nilai t_{hitung} variabel sistem pelaporan (X_3) sebesar 4,232 yang lebih besar dari t_{tabel} yakni sebesar 1,687 atau $t_{hitung} 4,232 > 1,687 t_{tabel}$. Maka hipotesis pertama (H_3) diterima. Sementara untuk nilai koefisien regresi ini dapat dinyatakan signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,001 ($0,001 < 0,05$) Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi sistem pelaporan (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji parsial atau uji t maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dan kedua terbukti atau diterima dan pengaruhnya secara positif dan signifikan. Sementara untuk melihat variabel mana yang paling dominan atau kuat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diketahui dengan melihat kolom Standardized Coefficients Beta. Dalam kolom Standardized Coefficients Beta dapat dilihat bahwa nilai variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) sebesar 0,212, nilai variabel pengendalian akuntansi (X_2) sebesar 0,119 dan nilai variabel sistem pelaporan (X_3) sebesar 0,594. Variabel yang paling kuat adalah variabel sistem pelaporan (X_3).

IV. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Hasil Uji Hipotesis Kedua menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,002 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,002. hasil perhitungan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} , diperoleh nilai $t_{hitung} 1,969 > 1,687 t_{tabel}$. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012), Mengindikasikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut berarti jika kejelasan sasaran anggaran (Xi) jika mengalami kenaikan maka akan berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Sebaliknya jika kejelasan sasaran anggaran (Xi) mengalami Penurunan maka akan berdampak pada penurunan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

2. Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Hasil Uji Hipotesis ketiga menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai koefisien regresi variabel sistem pelaporan sebesar 0,002 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0.000. hasil perhitungan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} , diperoleh nilai t_{hitung} 3,345 > 1,687 t_{tabel} . Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas-kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012), mengindikasikan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut berarti jika sistem pelaporan (X_2) jika mengalami kenaikan maka akan berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Sebaliknya jika sistem pelaporan (X_2) mengalami penurunan maka akan berdampak pada penurunan pada akuntabilitas kinerja-instansi pemerintah (Y).

3. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Hasil Uji Hipotesis ketiga menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai koefisien regresi variabel sistem pelaporan sebesar 0,001 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0.000. hasil perhitungan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} , diperoleh nilai t_{hitung} 4,232 > 1,687 t_{tabel} . Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012), mengindikasikan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut berarti jika sistem pelaporan (X_3) jika mengalami kenaikan maka akan berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Sebaliknya jika sistem pelaporan (X_3) mengalami penurunan maka akan berdampak pada penurunan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

V. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian bahwa : (a) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, (b) Pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, (c) Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Keterbatasan. Penelitian ini ruang lingkungnya hanya pada pemerintah kabupaten Enrekang, penelitian lebih lanjut dapat mengembangkan pada wilayah yang lebih luas lagi.

REFERENSI

- Abdullah, 2011. Pengaruh *kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*, kompak, No 13:37-67
- Anjarwati, 2012. Pengaruh *kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Accounting analysis journal vol 1 no 2
- Bastian, indra. 2010. *Sistem akuntansi sektor publik*, salamba empat, Jakarta.
- Herawaty, netty. 2011. *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota jambi*. simposium nasional akuntansi vol.13.Jambi.
- Indudewi, dian. 2009. *Pengaruh sasaran jelas dan terukur, insentif, desentralisasi dan pengukuran kinerja terhadap kinerja organisasi*, tesis S-2 Universitas Diponegoro Semarang:diunduh dari: perpustakaan elektronik UNDIP: <http://www.e-prints.undip.ac.id>
- Kusumaningrum, indraswati. 2010. *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi jawa tengah*. Tesis universitas diponegoro.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi sector public*. Andi. Yogyakarta
- Puspita sari, winda. 2011. *Analisa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada badan kepegawaian daerah kota padang*. Skripsi universitas andalas.
- Setiawan, eko. 2013. *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan*. Skripsi. Jurusan akuntansi. Universitas Riau.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Suhartono, ehrmann, solichin, mohammad, 2006. *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi*. SNA 9. Padang.